



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- /67 - 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

--	--

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Walikota merujuk kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Solok Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Februari 2022



~~WALIKOTA SOLOK,~~

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188/45/61/2022
TENTANG : PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026 TERHADAP RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022	Keterangan
Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97.32	
	Predikat evaluasi Kota Layak Anak	%	Nindya	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Predikat	58.89	

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45.167 -2022

TENTANG : PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penerapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota		Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<p>B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi /kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi <u>Dirubah menjadi :</u> Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi</p>		<p>B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)</p> <p>B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi) <u>Dirubah menjadi :</u> Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
					B12 : -		B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota		Tersedianya tolok ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	B03 : 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03 : 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat nilai-nilai tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/Kota		Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD.		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusunan RKPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p> <p>B06: Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum: di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum: di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif</p>		<p>4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.</p> <p>B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p> <p>B09: 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah satu dasar hukum atau termuat di BAB I 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG					B12 :		B12 :
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lmbaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten/Kota		Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	<p>B03 :</p> <p>1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</p> <p>2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</p>		<p>B03 :</p> <p>1. Scan surat permohonan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</p> <p>2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha, melampirkan surat usulan Draft ke Bagian Hukum.</p>
					<p>B06:</p> <p>1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Insiansi</p>		<p>B06:</p> <p>Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah ditanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten/Kota		Tertaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur, dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pckja PUG
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	1. Tertaksananya Promosi dan advokasi	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasipengarusutamaan gender oleh Ketua dan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Wakil daerah/kabkota di instansi vertikal Kabkota			memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK, sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
Stakeholder terkait di instansi OPD yang memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya	Pemilihan Kabupaten/Kota		Tersedia program dan kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan khususnya	Tersusunnya Program dan Kegiatan dengan sasaran kelompok rentan	B03: - B06: - B09: 1. Terintegrasi program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan B12: -		B03: - B06: - B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja SKPD B12: -

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan, di daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan	Terwujudnya pelaksanaan	Terlaksananya sosialisasi	B03:		03:
---------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------	------	--	-----

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2021	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota
					B06: -		B06: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2023	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 : 1.		B03 :
					B06: -		B06: -
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023
					B12: -		B12:
		BPKAD	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2023 dan KUAPPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengomdir	B03: -		B03: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
				hal-hal tentang kesetaraan Gender	B06: - B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023		B06: - B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2022 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD
					B12: Ditetaokannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) (B03) 4. Badan Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan: a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan perugasan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Daerah (B06, B09) 5 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPD) (B12)			<ul style="list-style-type: none"> b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah 		<p>prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					<p>B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning 		<p>B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan iink <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print screen menu tagging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2022 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari - Maret 2022.		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari - Maret 2022.

1

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Pedoman Review Terhadap PPRG di Pemerintah Kab/Kota	Penyusunan pedoman Review yang memuat PPRG	<p>B03: Terbitnya pedoman Review yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota</p> <p>B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April – Juni 2021</p> <p>B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli – September 2022</p> <p>B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober – Desember 2022</p>		<p>B03: Scan Pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota</p> <p>B06: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Notadinas, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April – Juni 2021</p> <p>B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli – September 2022</p> <p>B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GES tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober – Desember 2022</p>

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

